

---

## Pengaruh PAD, Belanja Daerah, Dan Silpa Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan 2015-2024

Ine Nurfa Putri<sup>1</sup>, Kartika Berliani<sup>2</sup>

Universitas Indonesia Membangun, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [Inenurfa@student.inaba.ac.id](mailto:Inenurfa@student.inaba.ac.id)<sup>1</sup>, [kartika.berliani@inaba.ac.id](mailto:kartika.berliani@inaba.ac.id)<sup>2</sup>

---

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 30 November 2025

---

### ABSTRACT

*This study analyzes the influence of Regional Original Revenue (PAD), Regional Expenditure, and Budget Surplus (SiLPA) on the Regional Financial Independence of South Tangerang City from 2015 to 2024. The research aims to measure trends in PAD, expenditure, and SiLPA, and to examine their partial and simultaneous effects on financial independence. The study uses a quantitative method with descriptive and verification approaches, employing secondary data sourced from the Regional Financial and Asset Agency (BKAD). The results show that PAD has a positive and significant effect on financial independence, indicating that higher PAD supports improvements in fiscal capacity. Conversely, regional expenditure has a negative and significant effect, suggesting that increasing spending weakens financial independence when not balanced with adequate revenue growth. Meanwhile, SiLPA has a positive yet insignificant effect, meaning that surplus funds do not substantially contribute to financial independence. Overall, the financial independence level of South Tangerang City remains low, highlighting the need to optimize PAD, improve expenditure efficiency, and utilize SiLPA more productively.*

**Keywords:** Regional Original Revenue, Regional Expenditure, SiLPA, Fiscal Independence Finance.

### ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan pada periode 2015-2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perkembangan PAD, belanja daerah, dan SiLPA serta menguji pengaruh parsial maupun simultan ketiga variabel tersebut terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BKAD Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan, yang berarti peningkatan PAD dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah. Sebaliknya, belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga peningkatan belanja cenderung menurunkan tingkat kemandirian apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Sementara itu, SiLPA berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian, sehingga surplus anggaran belum mampu memberikan kontribusi yang berarti. Secara keseluruhan, tingkat kemandirian keuangan Kota Tangerang Selatan masih tergolong rendah sehingga memerlukan optimisasi PAD, peningkatan efisiensi belanja, serta pemanfaatan SiLPA secara lebih efektif.*

**Kata Kunci:** PAD, Belanja Daerah, SiLPA, Kemandirian Keuangan Daerah.

## PENDAHULUAN

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Banten yang resmi berdiri pada 26 November 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008. Kota ini terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang dan memiliki luas wilayah sekitar 147,19 km<sup>2</sup>, terdiri dari 7 kecamatan dan 54 kelurahan, dengan pusat pemerintahan di Ciputat. Sebagai bagian dari kawasan Jabodetabek, Tangerang Selatan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kabupaten Bogor. Posisi geografis yang menguntungkan ini menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota penyangga ibu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di sektor jasa, perdagangan, pendidikan, dan perumahan.

Berdasarkan data yang tersedia, PAD Kota Tangerang Selatan pada TA 2024 telah terealisasi sebesar ± Rp 2,35 triliun (≈ 103,21 % dari target). ( Sumber : [banten.bisnis.com](https://banten.bisnis.com)) Untuk TA 2025, PAD ditargetkan sebesar ± Rp 2,575 triliun, meningkat dari target TA 2024 sebesar ± Rp 2,016 triliun (Sumber : [portalkota.id+1](https://portalkota.id+1)) Meskipun demikian, peningkatan PAD ini belum sepenuhnya dibuktikan menurunkan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat."

Selain PAD, belanja daerah juga berperan penting dalam mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah yang tinggi seharusnya dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat apabila dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, apabila belanja tidak dikelola dengan baik, justru dapat menimbulkan inefisiensi dan ketergantungan terhadap sumber dana eksternal. (Menurut Mardiasmo, 2018), "efektivitas dan efisiensi belanja daerah sangat menentukan kemampuan suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskalnya." Penelitian (Ridwan, 2020) menunjukkan bahwa kualitas audit internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian internal yang baik meningkatkan pengawasan, mengurangi kesalahan, dan memperkuat tata kelola pembiayaan perusahaan.

Selain PAD dan belanja daerah, aspek penting lainnya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). SILPA menggambarkan sisa dana dari pelaksanaan anggaran yang belum terserap pada akhir tahun anggaran. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, SILPA dapat terjadi karena adanya efisiensi penggunaan anggaran, realisasi pendapatan yang lebih besar dari perkiraan, atau keterlambatan pelaksanaan program. SILPA yang tinggi tidak selalu menunjukkan hal positif. Di satu sisi, SILPA bisa mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran, namun di sisi lain, bisa juga menjadi indikator lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Di Kota Tangerang Selatan, SILPA yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam mendukung kemandirian fiskal. Sedangkan Peneliti (Ulqisti & Berliani, 2024) menganalisis pengaruh empat sumber pendanaan daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal. Tetapi menurut peneliti (Endayani, F., & Berliani, 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah memiliki

pengaruh, tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal; (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap belanja modal; dan (3) Dana Bagi Hasil pun terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan data dari Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dalam kurun waktu tahun 2015–2024, Kota Tangerang Selatan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam realisasi PAD, belanja daerah, dan SILPA. Pada tahun 2023, misalnya, realisasi PAD mencapai sekitar Rp 1,983 triliun, namun tingkat kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 48%, yang dikategorikan rendah. Tahun 2024, meskipun PAD meningkat menjadi Rp 2,347 triliun, tingkat kemandirian hanya naik sedikit menjadi 50,93%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum berbanding lurus dengan peningkatan kemandirian daerah, karena pengeluaran pemerintah yang tinggi dan pengelolaan SILPA yang belum optimal masih menjadi tantangan utama ( Sumber : [Portal Data SIKD](#) )

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Tangerang Selatan masih menghadapi persoalan dalam hal efektivitas belanja dan optimalisasi penerimaan daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan pendapatan benar-benar dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Kemandirian Keuangan Daerah menjadi sangat penting.

Menurut (Pratama & Haryanto, 2022) tingkat kemandirian fiskal suatu daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengelola belanja secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi proporsi PAD terhadap total pendapatan, maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut peneliti (Utami, Y. R., Lilianti, E., & Putra, 2024) menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat kemandirian daerah. Berdasarkan analisis rasio kontribusi, ditemukan bahwa PAD hanya menyumbang rata-rata 29,4% dari total APBD. dan Peneliti (Susanto, B. K. A. & Berliani, K 2024) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan peningkatan PAD menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Di sisi lain.

Kondisi ini menandakan kemampuan keuangan daerah yang kurang mandiri, sehingga jika dana dari pusat berkurang, daerah berpotensi mengalami kesulitan dalam membiayai operasional dan pembangunan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan melalui peningkatan PAD dan efisiensi belanja daerah.

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah**

Tahun	Realisasi PAD X1	Realisasi Belanja Daerah X2	SILPA X3	Rasio Kemandirian Y	Kemampuan Keuangan
2015	Rp 1.228.390.000.000	Rp 2.621.240.000.000	Rp 522.250.000.000	47%	Rendah
2016	Rp 1.346.240.000.000	Rp 2.888.890.000.000	Rp 724.260.000.000	47%	Rendah
2017	Rp 1.622.000.000.000	Rp 2.967.630.000.000	Rp 668.000.000.000	55%	Sedang
2018	Rp 1.621.710.000.000	Rp 3.271.440.000.000	Rp 495.310.000.000	50%	Rendah
2019	Rp 1.817.510.000.000	Rp 3.500.000.000.000	Rp 499.350.000.000	52%	Sedang
2020	Rp 1.538.710.000.000	Rp 3.143.400.000.000	Rp 413.620.000.000	49%	Rendah
2021	Rp 1.713.720.000.000	Rp 3.193.510.000.000	Rp 160.570.000.000	54%	Sedang
2022	Rp 2.017.360.000.000	Rp 3.226.620.000.000	Rp 194.560.000.000	63%	Sedang
2023	Rp 1.983.320.000.000	Rp 4.131.670.000.000	Rp 589.350.000.000	48%	Rendah
2024	Rp 2.347.130.000.000	Rp 4.608.520.000.000	Rp 220.350.000.000	51%	Rendah

Sumber: [Portal Data SIKD](#)

Pada 2023, Realisasi PAD sebesar Rp 1.983 triliun menghasilkan Kemandirian keuangan daerah sebesar 48%. Ini menunjukkan hubungan positif, tetapi masih rendah meskipun PAD cukup tinggi, mungkin karena faktor eksternal seperti peningkatan total pendapatan dari sumber lain. Pada 2024, PAD meningkat menjadi Rp 2.347 triliun, dan Kemandirian keuangan Daerah naik menjadi 51%, yang mengindikasikan bahwa peningkatan PAD membantu meningkatkan Kemandirian, meskipun masih relatif rendah. Pola ini menunjukkan bahwa Realisasi PAD tetap menjadi pendorong utama kemandirian, tapi tidak cukup untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam dua tahun terakhir.

Secara keseluruhan untuk periode ini, hubungan positif terlihat, di mana Realisasi PAD yang lebih tinggi (dari 2023 ke 2024) mendukung peningkatan Kemandirian tetapi Kemampuan Keuangan tetap "Rendah" karena belum mencapai ambang yang dianggap baik (misalnya, di atas 50-60%). Menurut (Halim & Kusufi, 2020) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat secara langsung memengaruhi rasio kemandirian keuangan daerah, karena semakin besar PAD yang diperoleh, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Peneliti (Fitriani & Syarif, 2025) mengungkapkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta besarnya SiLPA memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada 2023, Realisasi Belanja mencapai Rp 4.131 triliun, dan Kemandirian hanya 48%, yang menunjukkan hubungan negatif karena belanja yang tinggi mungkin telah menekan kemandirian dengan menciptakan ketergantungan pada dana luar. Pada 2024, Realisasi Belanja bahkan lebih tinggi (Rp 4.608 triliun), tetapi Kemandirian naik tipis menjadi 51%. Ini mengindikasikan bahwa belanja yang terus meningkat bisa menghambat Kemandirian, meskipun ada peningkatan PAD. Pola ini menyoroti bahwa Realisasi Belanja yang berlebih cenderung melemahkan Kemandirian terutama jika tidak seimbang dengan pendapatan.

Untuk dua tahun ini, hubungan negatif dominan, di mana Realisasi Belanja tinggi berkontribusi pada Kemampuan Keuangan yang "Rendah" di kedua tahun menurut Berdasarkan penelitian (Berliani, K 2016) Secara rata-rata, tingkat

kemandirian daerah masih sangat rendah (7,15%), efektivitas tergolong sangat baik (100,41%), efisiensi cukup baik (95,45%), dan keserasian belanja masih rendah (38,28%). Pada 2023, SILPA sebesar Rp 589 triliun (surplus tinggi), tetapi Kemandirian hanya 48%, menunjukkan hubungan positif yang terbatas karena surplus tidak sepenuhnya diterjemahkan ke kemandirian yang lebih baik. Pada 2024, SILPA turun drastis menjadi Rp 220 triliun, dan Kemandirian naik menjadi 51%, yang mungkin menunjukkan bahwa penurunan surplus tidak menghambat Kemandirian secara signifikan kali ini, tapi secara keseluruhan, SILPA yang lebih rendah bisa melemahkan dukungan untuk Kemandirian.

Pola untuk dua tahun ini: Hubungan positif lemah, di mana SILPA tinggi di 2023 seharusnya mendukung Kemandirian, tetapi tetap rendah di 2024, penurunan SILPA tidak menurunkan Kemandirian lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa SILPA membantu, tapi dipengaruhi oleh faktor lain seperti PAD dan belanja, dengan Kemampuan Keuangan tetap "Rendah". Fenomena tersebut menegaskan bahwa meskipun PAD meningkat dan belanja daerah juga naik, namun tingkat kemandirian keuangan Kota Tangerang Selatan belum menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah serta belum optimalnya pengelolaan SILPA dalam mendukung keseimbangan fiskal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama periode 2015-2024; (2) Mengetahui pengaruh parsial dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan; serta (3) Mengidentifikasi pengaruh simultan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun anggaran 2015-2024.

## METODE

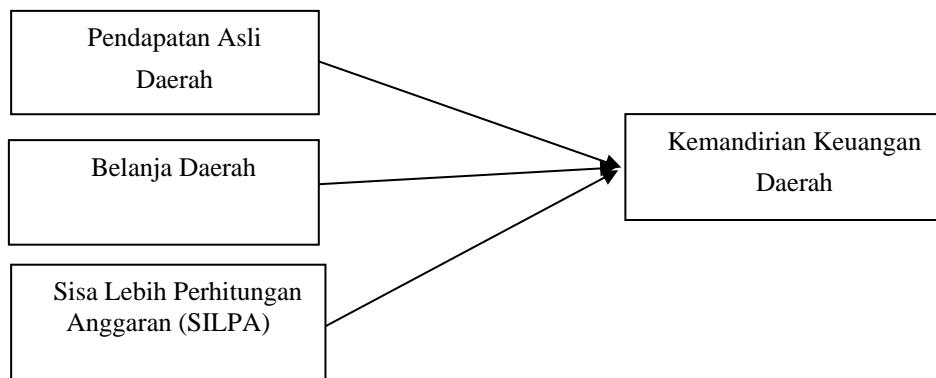
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, yang bertujuan untuk menguji hipotesis berdasarkan data numerik yang diolah secara statistik. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pengaruh PAD, Belanja Daerah, dan SILPA terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan 2015-2024

*Tabel 2.1 Operasional Variabel*

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, "Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi."	$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$	Rasio

Pendapatan Asli Daerah (X1)	<p>Pendapatan asli daerah merupakan "hak pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diporoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan dipisahkan serta hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah."</p> <p>Sumber : UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p>	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2024	Nomina 1
Belanja Daerah (X2)	<p>"keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan dicatat dalam APBD. Belanja ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan penerimaan kembali, melainkan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran tersebut merupakan wujud pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah, di mana daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangannya sendiri guna mencapai pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."</p> <p>Sumber : Mahmudi (2019:68)</p>	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2024	Nomina 1
SILPA (X3)	<p>sisa dana dari pelaksanaan APBD yang belum digunakan pada tahun anggaran berjalan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pada awal tahun anggaran berikutnya</p> <p>Sumber: Halim dan Kusufi 2022</p>	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2024	Nomina 1

### Kerangka Konseptual



Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dan studi kepustakaan dengan memperoleh data melalui berbagai literatur seperti buku, jurnal penelitian, artikel, dan skripsi. Dalam memperoleh data-data pada penelitian, peneliti menggunakan

dua cara yaitu penelitian dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Daerah Kota Tanggerang Selatan

Pada teknik pengambilan sampel penulis menggunakan teknik nonprobability sampling. "Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel" Sugiyono, (2019). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pemerintah daerah atas Laporan Realisasi Anggaran Periode 2015-2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, jumlah populasi sebanyak 10 tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan analisis variabel penelitian yang berlandaskan pada data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran perusahaan Kota Tangerang Selatan tahun 2015-2024. Berikut datanya :

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

**Tabel 3.1 Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Res
N		
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,000
	Std. Deviation	,0015
Most Extreme Difference	Absolute	
	Positive	
	Negative	
Test Statistic		
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	
	99% Confidence Interv	Lower Bo
		Upper Bo

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting 299883525.

**Sumber: Hasil SPSS Versi. 27**

Berdasarkan hasil uji, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $p > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

### 3.1.2 Uji Multikolinieritas

**Tabel 3.2 Hasil Uji Multikolinieritas**

Mod	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistic	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig		
	B	Std. Err	Beta					
(Const)	,491	,010			49,430	,000		
R. P	8,367E-	,000	2,216		59,952	,000	,128	
R. Bel	-5,891E-	,000	-1,946		-59,974	,000	,166	
SIL	7,041E-	,000	,024		1,330	,232	,548	
							1,824	

a. Dependent Variable: RK

**Sumber : Hasil SPSS Versi. 27**

Berdasarkan hasil Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel R. PAD sebesar 0,128, R. Belanja sebesar 0,166, dan SILPA sebesar 0,548. Sementara nilai VIF masing-masing adalah 7,814 untuk R. PAD, 6,020 untuk R. Belanja, dan 1,824 untuk SILPA. nilai Tolerance untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

### Uji Heteroskeditas

**Tabel 3.3 Uji Heteroskeditas**

Mod	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig
	B	Std. Err	Beta			
(Const)	-,010	,004				,257
R. PA	3,592E-	,000		,468		,667
R. Bel	2,717E-	,000		,441		,716
SILP	2,099E-	,000		,348		1,020

a. Dependent Variable: ABS\_RES\_1

**Sumber : Hasil SPSS Versi. 27**

Berdasarkan hasil, diperoleh nilai signifikansi masing-masing variable R. PAD sebesar 0,530, R. Belanja sebesar 0,501, dan SILPA sebesar 0,344. Seluruh nilai Sig. tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Artinya, model regresi yang digunakan bebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat homogen dan model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

## Analisis Autokorelasi

**Tabel 3.4 Hasil Analisis Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

M	R Sq	Adjusted R Squ	Std. Error of the Estima	Durbin-Wat
	,99	,998	,0018887	2,105

a. Predictors: (Constant), SILPA, R. Belanja, R. PAD

b. Dependent Variable: RK

**Sumber : Hasil SPSS Versi. 27**

Hasil analisis, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,105. Nilai Durbin-Watson yang ideal berada di kisaran 1,5 hingga 2,5, yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Karena nilai Durbin-Watson dalam model ini berada pada angka 2,105, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, baik positif maupun negatif.

## Analisis Korelasi Berganda

**Tabel 3.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Mc	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statist	
	Unstandardized		Standardiz	t	Toler	VIF	
	Coefficients	B	Beta				
(Cor t)	,491	,010		49,43			
R. F	8,367E	,000	2,216	59,95	,12	7,814	
I Bela	-5,891E	,000	-1,946	-59,97	,16	6,020	
SIL	7,041E	,000	,024	1,330	,54	1,824	

a. Dependent Variable: RK

**Sumber : Hasil SPSS Versi. 27**

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa konstanta sebesar 0,491 menandakan Rasio Keuangan tetap memiliki nilai dasar meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Belanja, dan SILPA bernilai nol. Variabel PAD memiliki koefisien positif sebesar 0,0000008367, yang berarti peningkatan PAD akan meningkatkan Rasio Keuangan, sedangkan Realisasi Belanja memiliki koefisien negatif sebesar -0,0000005891, menunjukkan bahwa peningkatan belanja dapat menurunkan Rasio Keuangan.

Variabel SILPA memiliki pengaruh positif dengan koefisien sebesar 0,00000007041, yang mengindikasikan bahwa peningkatan SILPA berkontribusi terhadap naiknya Rasio Keuangan. Secara keseluruhan, PAD dan SILPA

berpengaruh positif terhadap Rasio Keuangan, sedangkan Realisasi Belanja berpengaruh negatif.

### Analisis Koefisien Product Moment Pearson

**Tabel 3.6 Analisis Koefisien Product Moment Pearson**  
**Correlations**

		R.	R. Be	SI
R. PAD	Pearson Correla	,88	-,	
	Sig. (2-tailed)	,00	,	
	N	10		
R. Belanja	Pearson Correla	,8	1	-,
	Sig. (2-tailed)	,0	,	
	N	10		
SILPA	Pearson Correla	-,	-,3	
	Sig. (2-tailed)	,0	,36	
	N	10		
RK	Pearson Correla	,	,01	-,
	Sig. (2-tailed)	,1	,96	,
	N	10		

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Sumber : Hasil SPSS Versi. 27**

Hasil analisis, dapat diketahui hubungan antarvariabel yang diuji menggunakan korelasi Pearson. Nilai korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara variabel independen (R. PAD, R. Belanja, dan SILPA) dengan variabel dependen (RK). Hasil analisis menunjukkan bahwa R. PAD memiliki korelasi positif sebesar 0,472 terhadap RK dengan nilai signifikansi sebesar 0,168, yang berarti hubungan tersebut tidak signifikan karena nilai *Sig.* > 0,05. Variabel R. Belanja memiliki korelasi sangat lemah dengan RK sebesar 0,017 dan nilai signifikansi 0,962, juga menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan. Sementara itu, SILPA memiliki korelasi negatif sebesar -0,581 terhadap RK dengan nilai signifikansi 0,078, yang berarti terdapat hubungan negatif namun tidak signifikan secara statistik. Selain itu, hubungan antarvariabel independen menunjukkan bahwa R. PAD dan R. Belanja memiliki korelasi sangat kuat sebesar 0,889 dengan tingkat signifikansi 0,001, yang berarti hubungan keduanya signifikan dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan R. PAD cenderung diikuti oleh peningkatan R. Belanja.

### Analisis Koefisien Determinasi

**Tabel 3.7 Analisis Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

R	S	Adjusted R Squ	Std. Error of the Esti	Durbin-W
			,00	

a. Predictors: (Constant), SILPA, R. Belanja, R.

b. Dependent Variable: RK

**Sumber : Hasil SPSS Versi. 27**

Berdasarkan hasil output Model Summary, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,998. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 99,8% variasi perubahan pada variabel dependen, yaitu Rasio Keuangan (RK), dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang meliputi R. PAD, R. Belanja, dan SILPA. Sementara sisanya sebesar 0,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

### Teknik Pengujian Hipotesis

#### Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T)

**Tabel 3.8 Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T)**

Mode	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	Collinearity Statistics Tolerance
	B	Std. Err		
(Constant)			4,98	0,998
R. PAD	8,36	1,59	5,33	0,000
R. Bel	-5,89	1,59	-3,74	0,000
SILPA	7,04	1,33	5,26	0,000

a. Dependent Variable: RK

**Sumber : Hasil SPSS Versi. 27**

Hasil uji t parsial dengan jumlah responden sebanyak 10 orang dan tiga variabel independen, derajat kebebasan (df) diperoleh dari perhitungan  $n - k - 1 = 10 - 3 - 1 = 6$ . Dengan taraf signifikansi 0,05 (dua arah), diperoleh nilai t tabel sebesar 2,447.

Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (R. PAD), nilai t hitung sebesar 59,952 lebih besar dari t tabel (2,447) dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa R. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rasio Keuangan, sehingga semakin tinggi PAD, semakin meningkat pula Rasio Keuangan. Variabel Realisasi Belanja memiliki nilai t hitung -59,974 dengan signifikansi 0,000, yang berarti lebih besar dari t tabel dan signifikan, namun arah pengaruhnya negatif – semakin tinggi Realisasi Belanja, maka Rasio Keuangan akan menurun. Sementara itu, variabel SILPA memiliki nilai t hitung 1,330 lebih kecil dari t tabel 2,447 dengan nilai signifikansi  $0,232 > 0,05$ , sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Keuangan, meskipun arah pengaruhnya positif.

#### Uji Signifikan Pengaruh Simultan (Uji F)

**Tabel 3.9 Uji Signifikan Pengaruh Simultan (Uji F)**

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Mean Square	F
Regressi			1904,590
Residual			
Total			

a. Dependent Variable: RK

b. Predictors: (Constant), SILPA, R. Belanja, R. PAD

**Sumber : Hasil SPSS Versi. 27**

Hasil uji ANOVA (F-test), diperoleh nilai F hitung sebesar 1904,590 dengan nilai signifikansi 0,000. Untuk derajat bebas pembilang ( $df_1$ ) = 3 dan derajat bebas penyebut ( $df_2$ ) = 6. Berdasarkan tabel distribusi F pada taraf signifikansi 0,05, diperoleh F tabel sebesar 4,76. Karena  $F_{\text{hitung}} (1904,590) > F_{\text{tabel}} (4,76)$  dan nilai signifikansi 0,000  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Rasio Keuangan (RK). Artinya, variabel R. PAD, R. Belanja, dan SILPA secara bersama-sama memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan Rasio Keuangan. Maka H4 diterima.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan, meskipun tingkat kemandiriannya masih tergolong rendah. Peningkatan PAD berkontribusi positif terhadap kemandirian, namun belum signifikan karena diimbangi dengan kenaikan belanja daerah dan pengelolaan SILPA yang belum optimal. Secara keseluruhan, kemampuan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi PAD, pengendalian belanja yang lebih efisien, serta pemanfaatan SILPA secara produktif. Penelitian selanjutnya dapat meninjau faktor lain seperti dana transfer dan efektivitas belanja modal dalam memengaruhi kemandirian fiskal daerah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempublikasikan karya ini. Tidak lupa, penulis menghaturkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta atas doa, dukungan, dan motivasi yang tidak pernah putus. Penulis juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat, membantu di saat sulit, dan menjadi tempat berbagi cerita selama proses penelitian ini, khususnya Aisyah, Afiqah, Adinda, Arsila, Jaenab, Nihayatuz, Apina, dan Esra. Kehadiran dan perhatian mereka sangat berarti dan menjadi kekuatan bagi penulis hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

**DAFTAR RUJUKAN**

Berliani, K. (2016). *Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka*. *Jurnal Indonesia Membangun*, 15(2).

Endayani, F., & Berliani, K. (2023). Predictors of capital expenditures in regency/city regional government in West Java Province 2017–2022. *Journal of Accounting Inaba*, 2. <https://doi.org/10.56956/jai.v2i02.247>

Fitriani, & Syarif. (2025). Pengaruh PAD, belanja modal dan SiLPA terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di Jawa Barat tahun 2016–2023. *ECo Fin: Economics and Financial*, 7(1).

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Pengelolaan keuangan daerah* (Edisi keempat). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Pratama, A., & Haryanto, D. (2022). *Manajemen keuangan daerah: Konsep dan implementasi*. Mitra Wacana Media.

Ridwan. (2020). Pengaruh kualitas internal audit terhadap efektivitas pengendalian internal pembiayaan di Adira Finance Syariah Area Jawa Barat. *Jurnal Indonesia Membangun*, 19(3).

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susanto, B. K. A., & Berliani, K. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(4).

Ulqisti, & Berliani, K. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2022. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(3). <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2430>

Utami, Y. R., Lilianti, E., & Putra, P. S. (2024). Analisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD dalam mengukur potensi kemandirian daerah di Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 21(2). <https://doi.org/10.31851/jmwe.v21i2.16092>